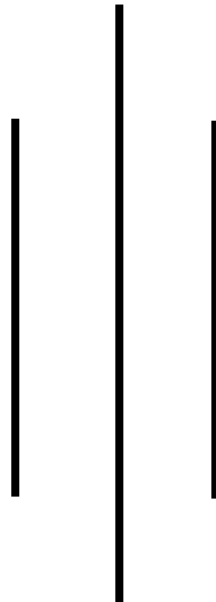




**RENCANA KERJA PERUBAHAN
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran tahun 2025 yang merupakan rencana kerja tahunan. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Anggaran adalah dokumen perencanaan untuk periode pada triwulan akhir tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal.

Penyusunan dokumen ini didasarkan pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta Surat Edaran Bupati Kendal Nomor 000.7.2/655/Baperlitbang tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025.

Rencana kerja perubahan dibuat setiap tahun dengan berdasarkan pada rencana strategis, dan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal sampai dengan bulan Maret 2025 atau di TW I, rencana kerja perubahan disusun sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program, dan kegiatan perubahan tahun 2025.

Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan perubahan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tahun 2025 dengan baik, namun karena keterbatasan banyak hal, maka kami menyadari bahwa rencana kerja perubahan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang. Semoga rencana kerja perubahan ini bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal dan Pemerintah Kabupaten Kendal

Kendal, Juli 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. KENDAL



RATNA MUSTIKANINGSIH, S.E, MM

Pemimpin Muda

NIP.19740404 199803 2 007



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I. PENDAHULUAN 1

 1.1. Latar Belakang 1

 1.2. Landasan Hukum 2

 1.3. Maksud dan Tujuan 4

 1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN
BERKENAAN 7

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I
 dan Renstra Perangkat Daerah 7

 2.2 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat... 36

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ... 37

BAB IV. PENUTUP 49



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Target dan Realisasi Kinerja Program s.d Triwulan I Tahun 2025	7
Tabel 2.2	Realisasai capaian kinerja dan tingkat capaian kinerja anggaran TW 1 tahun 2025	8
Tabel 2.3	Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan	15
Tabel 2.4	Realisasi Program / Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil / Keluaran Yang Direncanakan	18
Tabel 2.5	Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan	20
Tabel 2.6	Rekapitulasi Evaluas Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025.....	22
Tebal 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanananan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kendal	30
Tabel 2.8	Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	31
Tabel 2.9	Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025	36
Tabel 3.1	Uraian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Yang Mengalami Penurunan Ataupun Kenaikan Pagu Indikatif	41



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata cara Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sebagai implementasi setiap tahunnya maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas dijabarkan kembali menjadi Rencana Kerja (Renja) Dinas yang menjadi dasar / acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal setiap tahun/kinerja tahunan.

Dalam rangka meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun Perubahan Rencana Kerja dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut disusun dengan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025. Adapun nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.



1.2. Landasan Hukum

Sebagai Landasan Hukum Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana



- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 241);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 246);
 11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 23);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah sesuai dengan perkembangan kebijakan, dinamika kebutuhan masyarakat, serta kondisi faktual yang terjadi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Perubahan Renja ini menjadi instrumen penting guna menjamin keterpaduan, konsistensi, dan keselarasan perencanaan pembangunan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun kebijakan anggaran.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) adalah

- a. Menyesuaikan arah kebijakan, program, kegiatan, dan target kinerja perangkat daerah dengan perubahan yang terjadi baik pada aspek regulasi, kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, serta kebutuhan aktual masyarakat;
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan;
- c. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- d. Mengoptimalkan alokasi dan pemanfaatan sumber daya, baik anggaran, aparatur, maupun sarana dan prasarana, sehingga tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi pencapaian visi dan misi pembangunan daerah;
- e. Menjadi dasar dalam proses pengendalian, pemantauan, serta evaluasi kinerja perangkat daerah pada tahun berjalan

1.4. Sistematika Penyusunan

Sesuai Pasal 361 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan Perubahan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

a. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan



6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- b. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK.
- c. Realisasi keuangan Perangkat Daerah
Berisi penjelasan tentang realisasi keuangan perangkat daerah sampai dengan triwulan I tahun berjalan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program, Kegiatan, sub kegiatan yang mengalami perubahan beserta alasannya disertai dengan Lampiran Rancangan Perubahan RKPD 2025.

BAB IV PENUTUP

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.
Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap Perangkat Daerah yang bersangkutan.



BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I dan Renstra Perangkat Daerah

a. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Sebagaimana Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, demikian halnya dengan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan I dimaksudkan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program / kegiatan / sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program / kegiatan / sub kegiatan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi.

Target dan Realisasi Kinerja Program s.d Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Target dan Realisasi Kinerja Program s.d Triwulan I Tahun 2025

No	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2025 (%)	Realisasi Kinerja s.d Triwulan I Tahun 2025 (%)	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah (%)	%	100,00	23,00	
2	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	38.00	73.03	
		Persentase kepemilikan KK	%	99.80	84.66	
		Persentase kepemilikan KTP elektronik	%	99.89	99.90	



3	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan dokumen Perkawinan	%	99.80	90.60	
		Persentase Kepemilikan akta kelahiran anak (usia 0 - 18 tahun)	%	98.00	99.24	
		Persentase Penerbitan akta kematian	%	100.00	100.00	
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah lembaga pemerintah yang memanfaatkan data base Kependudukan	%	25.00	40.35	
		Sistem Informasi Kependudukan yang diperbarui	%	100.00	100.00	
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase tersusunnya Profil Kependudukan Kabupaten	%	100.00	100.00	

Tabel 2.2
Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja Anggaran
Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Target (%)	Persentase Realisasi (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.736.423.070	2.457.963.310	29,35	19,30
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	109.550.000	692.500	41,95	0,63
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	68.640.000	0	65,56	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.010.000	692.500	19,06	13,82
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.900.000	0	0	0,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.267.760.770	1.942.262.534	30,55	18,92
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.215.760.770	1.941.512.534	30,70	19,01



Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	52.000.000	750.000	0,96	1,44
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	125.000.000	0	0	0,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0	0,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	125.000.000	0	0	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	878.183.000	373.940.610	31,95	42,58
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.344.000	0	5,10	0,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	401.407.500	309.732.000	49,82	77,16
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.352.500	1.985.000	67,44	12,14
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.000.000	200.000	10,00	10,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	406.079.000	51.503.610	13,99	12,68
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	40.000.000	10.520.000	29,79	26,30
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	243.896.000	0	0	0,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	243.896.000	0	0	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	684.180.800	139.777.666	38,08	20,43
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.250.000	1.000.000	22,22	44,44
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	334.750.000	68.647.766	50,00	20,51
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	211.128.000	27.050.000	22,91	12,81
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	136.052.800	43.079.900	32,57	31,66
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	427.852.500	1.290.000	3,27	0,30



	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.652.500	0	27,12	0,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.200.000	1.290.000	0	5,12
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	351.000.000	0	0	0,00
2	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	302.250.000	21.440.000	7.31	7.09
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	175.250.000	21.440.000	12,60	12,23
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	100.000.000	0	0	0,00
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	66.070.000	21.040.000	32,89	31,85
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	9.180.000	400.000	3,81	4,36
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	127.000.000	0	0	0,00
	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.000.000	0	0	0,00
	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	125.000.000	0	0	0,00
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	152.843.800	16.680.000	39,79	10,91
	Pelayanan Pencatatan Sipil	49.420.800	15.780.000	32,98	31,93
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	49.420.800	15.780.000	32,98	31,93
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	103.423.000	900.000	43,04	0,87
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	3.423.000	900.000	28,30	26,29



	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil Jumlah	100.000.000	0	43,54	0,00
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.074.299.600	350.000	0,21	0,03
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	10.350.000	350.000	2,90	3,38
	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	10.350.000	350.000	2,90	3,38
	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	143.040.000	0	0,35	0,00
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	143.040.000	0	0,35	0,00
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	920.909.600	0	0,16	0,00
	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	134.039.600	0	0	0,00
	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	786.870.000	0	0,19	0,00
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	7.175.000	0	0	0,00
	Penyusunan Profil Kependudukan	7.175.000	0	0	0,00
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	7.175.000	0	0	0,00



Berdasarkan evaluasi kinerja yang ada di Aplikasi SIPD RI laporan pelaksanaan APBD sampai dengan triwulan I tahun anggaran 2025, maka realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD yang dievaluasi dan tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD s/d tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 109.550.000 (100 %), dimana target realisasi keuangan sesuai dengan rencana anggaran kas triwulan I Rp. 45.955.000 (41,95 %), total realisasi keuangan sampai dengan triwulan I sebesar Rp. 692.500 (0.63 %). Belum memenuhi target karena pelaksanaan kegiatan akan sampai dengan triwulan IV.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.267.760.770 (100 %), dimana target realisasi keuangan sesuai dengan rencana anggaran kas triwulan I Rp. 3.136.807.093 (30,55 %), total realisasi keuangan sampai dengan triwulan I Rp. 1.942.262.534 (18.92 %). Belum memenuhi target karena pelaksanaan kegiatan akan sampai dengan triwulan IV.
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 125.000.000 (100 %), dimana target realisasi keuangan sesuai dengan rencana anggaran kas triwulan I Rp. 0.00 (0 %), total realisasi keuangan sampai dengan triwulan I Rp. 0.00 (0 %). Belum memenuhi target karena pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan II.
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 243.896.000 (100 %), dimana target realisasi keuangan sesuai dengan rencana anggaran kas triwulan I Rp. 0.00 (0 %), total realisasi keuangan sampai dengan triwulan I Rp. 0.00 (0 %). Belum memenuhi target karena pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan II.



- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 684.180.800 (100 %), dimana target realisasi keuangan sesuai dengan rencana anggaran kas triwulan I Rp. 260.553.200 (38.08 %), total realisasi keuangan sampai dengan triwulan I Rp. 139.777.666 (20.43 %). Belum memenuhi target karena pelaksanaan kegiatan akan sampai dengan triwulan IV.
 - f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 427.852.500 (100 %), dimana target realisasi keuangan sesuai dengan rencana anggaran kas triwulan I Rp. 14.010.000 (3.27 %), total realisasi keuangan sampai dengan triwulan I Rp. 1.290.000 (0.30 %). Belum memenuhi target karena kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan II, III dan IV.
- II. Program Pendaftaran Penduduk
- g. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan pagu anggaran sebesar Rp. 175.250.000 (100 %), dimana target realisasi keuangan sesuai dengan rencana anggaran kas triwulan I Rp. 22.083.600 (12.60 %), total realisasi keuangan sampai dengan triwulan I Rp. 21.440.000 (12.23 %). Belum memenuhi target karena kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan II, III dan IV.
 - h. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dengan pagu anggaran sebesar Rp. 127.000.000 (100 %), dimana target realisasi keuangan sesuai dengan rencana anggaran kas triwulan I Rp. 0.00 (0 %), total realisasi keuangan sampai dengan triwulan I Rp. 0.00 (0 %). Belum memenuhi target karena kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan II, III dan IV.
- III. Program Pencatatan Sipil
- i. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil dengan pagu anggaran sebesar Rp. 49.420.800 (100 %), dimana target realisasi keuangan sesuai dengan rencana anggaran kas triwulan I Rp. 16.300.200 (32.98 %), total realisasi keuangan sampai dengan triwulan I Rp. 15.780.000 (31.93 %). Belum memenuhi target karena kegiatan akan dilaksanakan kembali pada triwulan II.
 - j. Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil dengan pagu anggaran sebesar Rp. 103.423.000 (100 %), dimana target realisasi keuangan sesuai dengan rencana anggaran kas

triwulan I Rp. 44.508.750 (43.04 %), total realisasi keuangan sampai dengan triwulan I Rp. 900.000 (0.87 %). Belum memenuhi target karena kegiatan akan dilaksanakan juga pada triwulan II, III dan IV.

IV. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- k. Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 143.040.000 (100 %), dimana target realisasi keuangan sesuai dengan rencana anggaran kas triwulan I Rp. 500.000 (0.35 %), total realisasi keuangan sampai dengan triwulan I Rp. 0.00 (0 %). Belum memenuhi target karena kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan II, III dan IV.
- l. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 920.909.600 (100 %), dimana target realisasi keuangan sesuai dengan rencana anggaran kas triwulan I Rp. 1.500.000 (0.16 %), total realisasi keuangan sampai dengan triwulan I Rp. 0.00 (0 %). Belum memenuhi target karena kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan II, III dan IV.

V. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

- m. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.175.000 (100 %), dimana target realisasi keuangan sesuai dengan rencana anggaran kas triwulan I Rp. 0.00 (0 %), total realisasi keuangan sampai dengan triwulan I Rp. 0.00 (0 %). Belum memenuhi target karena kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan IV.

Ada 14 kegiatan yang belum bisa mencapai target di triwulan I karena ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II, III dan IV. Jumlah realisasi capaian kinerja anggaran sampai dengan triwulan I adalah Rp. 2.496.433.310, dan Tingkat capaian kinerja realisasi anggaran sampai dengan triwulan I adalah 17.49 %.

Dari 34 Sub kegiatan ada 28 yang tidak dapat memenuhi target yang sudah ditetapkan di awal tahun, diantaranya sebagai berikut :



Tabel 2.3

Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil /
keluaran yang direncanakan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Target (%)	Persentase Realisasi (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.736.423.070			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	68.640.000	0	65,56	0,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.010.000	692.500	19,06	13,82
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.900.000	0	0	0,00
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.215.760.770	1.941.512.534	30,70	19,01
5	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0	0,00
6	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	125.000.000	0	0	0,00
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.344.000	0	5,10	0,00
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.352.500	1.985.000	67,44	12,14
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.000.000	200.000	10,00	10,00
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	406.079.000	51.503.610	13,99	12,68
11	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	40.000.000	10.520.000	29,79	26,30
12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	243.896.000	0	0	0,00
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	334.750.000	68.647.766	50,00	20,51



14	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	211.128.000	27.050.000	22,91	12,81
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	136.052.800	43.079.900	32,57	31,66
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.652.500	0	27,12	0,00
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	351.000.000	0	0	0,00
18	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	100.000.000	0	0	0,00
19	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	66.070.000	21.040.000	32,89	31,85
20	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.000.000	0	0	0,00
21	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	125.000.000	0	0	0,00
22	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	49.420.800	15.780.000	32,98	31,93
23	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	3.423.000	900.000	28,30	26,29
24	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil Jumlah	100.000.000	0	43,54	0,00
25	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait	143.040.000	0	0,35	0,00



	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				
26	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	134.039.600	0	0	0,00
27	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	786.870.000	0	0,19	0,00
28	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	7.175.000	0	0	0,00

- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 878.183.000 (100 %), dimana target realisasi keuangan sesuai dengan rencana anggaran kas triwulan I Rp. 200.000.000 (31.95 %), total realisasi keuangan sampai dengan triwulan I Rp. 373.940.610 (42.58 %). Sudah memenuhi target dan akan terus meningkatkan kinerja sehingga bisa mencapai target kinerja yang maksimal.
 - Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 10.350.000 (100 %), dimana target realisasi keuangan sesuai dengan rencana anggaran kas triwulan I Rp. 300.000 (2.90 %), total realisasi keuangan sampai dengan triwulan I Rp. 350.000 (3.38 %). Sudah memenuhi target dan akan terus meningkatkan kinerja sehingga bisa mencapai target kinerja yang maksimal.

Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan Ada 6 sub kegiatan yang memenuhi target yang ditetapkan diantaranya adalah :

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD pagu anggaran sebesar 52.000.000, target sampai dengan TW 1 sebesar 500.000 (0,96%) realisasi keuangan sebesar 750.000 (1,44%), realisasi fisik 1,59%.



- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pagu anggaran sebesar 401.407.500, target sampai dengan TW 1 sebesar 200.000.000 (49,82%) realisasi keuangan sebesar 309.732.000 (77,16%), realisasi fisik 84,88%.
- c. Penyediaan Jasa Surat Menyurat pagu anggaran sebesar 2.250.000, target sampai dengan TW 1 sebesar 500.000 (22,22%) realisasi keuangan sebesar 1.000.000 (44,44%), realisasi fisik 48,89%.
- d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pagu anggaran sebesar 25.200.000, target sampai dengan TW 1 sebesar 0 (0%) realisasi keuangan sebesar 1.290.000 (5,12%), realisasi fisik 5,63%.
- e. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk pagu anggaran sebesar 9.180.000 target sampai dengan TW 1 sebesar 350.000 (3,81%), realisasi keuangan sebesar 400.000 (4,36%), realisasi fisik 4,79%.
- f. Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan pagu anggaran sebesar 10.350.000, target sampai dengan TW 1 sebesar 300.000 (2,90%) realisasi keuangan sebesar 350.000 (3,38%), realisasi fisik 3,72 %.

Tabel 2.4

Realisasi Program / Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil
/ Keluaran Yang Direncanakan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase Target (%)	Prosentase Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.736.423.070			
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	52.000.000	750.000	0,96	1,44
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	401.407.500	309.732.000	49,82	77,16
3	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.250.000	1.000.000	22,22	44,44
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.200.000	1.290.000	0	5,12



	Lainnya				
5	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	9.180.000	400.000	3,81	4,36
6	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	10.350.000	350.000	2,90	3,38

3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

- a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.878.183.000 (100 %), dimana target realisasi keuangan sesuai dengan rencana anggaran kas triwulan I Rp.200.000.000 (31.95 %), total realisasi keuangan sampai dengan triwulan I Rp.373.940.610 (42.58 %). Sudah memenuhi target dan akan terus meningkatkan kinerja sehingga bisa mencapai target kinerja yang maksimal.
- b. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan dengan pagu anggaran sebesar Rp.10.350.000 (100 %), dimana target realisasi keuangan sesuai dengan rencana anggaran kas triwulan I Rp.300.000 (2.90 %), total realisasi keuangan sampai dengan triwulan I Rp.350.000 (3.38 %). Sudah memenuhi target dan akan terus meningkatkan kinerja sehingga bisa mencapai target kinerja yang maksimal.

Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Ada 6 sub kegiatan yang memenuhi target yang ditetapkan diantaranya adalah :

- a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD pagu anggaran sebesar 52.000.000, target sampai dengan TW 1 sebesar 500.000 (0,96%) realisasi keuangan sebesar 750.000 (1,44%), realisasi fisik 1.59%.
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pagu anggaran sebesar 401.407.500, target sampai dengan TW 1 sebesar 200.000.000 (49,82%) realisasi keuangan sebesar 309.732.000 (77,16%), realisasi fisik 84,88%.
- c. Penyediaan Jasa Surat Menyurat pagu anggaran sebesar 2.250.000, target sampai dengan TW 1 sebesar 500.000 (22,22%)



- realisasi keuangan sebesar 1.000.000 (44,44%), realisasi fisik 48,89%.
- d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pagu anggaran sebesar 25.200.000, target sampai dengan TW 1 sebesar 0 (0%) realisasi keuangan sebesar 1.290.000 (5,12%), realisasi fisik 5,63%.
- e. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk pagu anggaran sebesar 9.180.000 target sampai dengan TW 1 sebesar 350.000 (3,81%), realisasi keuangan sebesar 400.000 (4,36%), realisasi fisik 4,79%.
- f. Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan pagu anggaran sebesar 10.350.000, target sampai dengan TW 1 sebesar 300.000 (2,90%) realisasi keuangan sebesar 350.000 (3,38%), realisasi fisik 3,72%.

Tabel 2.5

Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase Target (%)	Prosentase Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.736.423.070			
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	52.000.000	750.000	0,96	1,44
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	401.407.500	309.732.00 0	49,82	77,16
3	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.250.000	1.000.000	22,22	44,44
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.200.000	1.290.000	0	5,12
5	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	9.180.000	400.000	3,81	4,36



6	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	10.350.000	350.000	2,90	3,38
---	--	------------	---------	------	------

- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan Dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang yang tidak dapat mencapai target disebabkan oleh :
- Penjadwalan dari sub kegiatan tersebut di triwulan III dan IV
 - Anggaran di realisasikan sesuai dengan kebutuhan
- Untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang yang dapat mencapai target dan melebihi target disebabkan oleh:
- Sub kegiatan di jadwalkan di awal tahun setelah APBD disahkan;
 - Sub kegiatan yang sifatnya rutin.
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.
- Akibat yang timbul dari target yang tidak tercapai adalah capaian realisasi dinas rendah (realisai POK) rendah.
 - Secara makro menghambat pelayanan kepada masyarakat
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- Dalam menentukan anggaran kas untuk lebih berhati hati supaya dapat tercapai sesuai dengan target dan rencana anggaran kas.
 - Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Berisikan telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat.



Tabel 2.6
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai triwulan I	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2	12				URUSAN PEMERINTAH BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
2	12	2			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Prosentase Kepemilikan KK	99,80	99,80	84,66	84,83	99,80	84,66	84,83
						Persentase Kepemilikan KTP Elektronik (%)	99,89	99,89	99,90	100,01	99,89	99,90	100,01
						Prosentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	38,00	38,00	73,03	192,11	38,00	73,03	192,11
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk								
2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan	Terlaksananya Koordinasi Sosialisasi Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00



					Administrasi Kependudukan	Administrasi Kependudukan (Kegiatan)							
2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Berkas)	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00
2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Mobil Keliling/ UP3SK (Kegiatan)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	12 Laporan	100,00
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk								
2	12	02	2.03	0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Tercapainya Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Kegiatan)	30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	100,00	30 Laporan	30 Laporan	100,00
2	12	02	2.03	0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Prosentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak (Usia 0 - 18 Tahun)	98,00	98,00	99,24	100,27	98,00	99,24	100,27
						Prosentase Penerbitan Akta Kematian	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
						Prosentase Kepemilikan Dokumen Perkawinan	99,80	99,80	90,60	90,78	99,80	90,60	90,78
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil								
2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	100,00	3 Layanan	3 Layanan	100,00
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil								
2	12	03	2.02	0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	12 Laporan	100,00



					Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)							
2	12	03	2.02	0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pelayanan Pencatatan Sipil (Kegiatan)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	12 Laporan	100,00
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah Lembaga Pemerintah Yang Memanfaatkan Data Base Kependudukan	40,82	40,82	40,35	98,85	40,82	40,35	98,85
						Sistem Informasi Kependudukan Yang Diperbarui	100	100	100	100,00	100	100	100,00
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan								
2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	24 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen	100,00	24 Dokumen	24 Dokumen	80,00
2	12	04	2.02		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								
2	12	04	2.02	0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun (Dokumen)	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								



2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	12 Laporan	100,00
2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	12 Laporan	100,00
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Tersusunnya Profil Kependudukan Kabupaten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan								
2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Perangkat Daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00
2	12	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	1 Laporan	100,00
2	12	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100,00	2 Laporan	2 Laporan	100,00



2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang	94 Orang	94 Orang	100,00	94 Orang	940 Orang	100,00
2	12	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	12 Laporan	100,00
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
2	12	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	94 paket	94 paket	94 paket	100,00	94 paket	94 paket	100,00
2	12	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100,00	100 Orang	100 Orang	100,00
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
2	12	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	100,00	5 Paket	5 Paket	100,00
2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100,00	12 Paket	12 Paket	100,00
2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100,00	12 Paket	12 Paket	100,00
2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100,00	12 Paket	12 Paket	100,00
2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	12 Laporan	100,00



2	12	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
2	12	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit	12 Unit	100,00	12 Unit	12 Unit	100,00
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	12 Laporan	100,00
2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	12 Laporan	100,00
2	12	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	12 Laporan	100,00
2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	12 Laporan	100,00
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	54 Unit	54 Unit	54 Unit	100,00	54 Unit	54 Unit	100,00
2	12	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	50 Unit	100,00	50 Unit	50 Unit	100,00
2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	7 Unit	100,00	7 Unit	7 Unit	100,00

b. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal dilakukan untuk mengukur sejauh mana capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan, serta mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

Secara umum, kinerja pelayanan Dispendukcapil Kendal menunjukkan tren positif. Hal ini ditunjukkan melalui peningkatan capaian beberapa indikator pelayanan, antara lain:

- Persentase penduduk yang memiliki KTP-el.
- Persentase anak usia 0–17 tahun yang memiliki KIA.
- Persentase kelahiran yang tercatat dan diterbitkan akta kelahiran.
- Jumlah pelayanan dokumen adminduk yang diselesaikan tepat waktu.
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Dispendukcapil.

Capaian tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan berbagai strategi peningkatan mutu layanan, termasuk inovasi pelayanan jemput bola, pemanfaatan layanan digital, serta peningkatan kapasitas SDM dan sistem informasi pelayanan.

Meskipun terdapat peningkatan kinerja, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain:

- Masih terdapat penduduk rentan (misalnya penyandang disabilitas, lansia, masyarakat terpencil) yang belum sepenuhnya terlayani.
- Keterbatasan sarana prasarana penunjang layanan digital di daerah tertentu.
- Kualitas jaringan internet yang belum merata sebagai penopang sistem layanan daring.
- Masih dibutuhkan peningkatan literasi masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan.

Berdasarkan analisis tersebut, rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan meliputi:

- Meningkatkan kerja sama lintas sektor untuk menjangkau masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan.
- Optimalisasi pelayanan digital dengan penyempurnaan sistem dan peningkatan kapasitas operator.
- Penguatan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan dan prosedur pelayanannya.



- Penambahan sarana pendukung pelayanan, terutama untuk pelayanan keliling dan di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).



Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kendal

NO	Indikator	IKK	Target Renstra PD Tahun 2025	Target Renja PD Tahun 2025	Realisasi Capaian Triwulan 1 Tahun 2025	Proyeksi Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase penduduk yang memiliki administrasi lengkap (IKU)					
		Perekaman KTP Elektronik	99.89	99.89	99.90	99.91
		Persentase anak usia 0-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	38.00	38.00	73.03	39
		Kepemilikan Akta Kelahiran	98.00	98.00	99.24	98.5
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	38.60	38.60	40.35	42.11



c Realisasi Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal merupakan gambaran pelaksanaan anggaran terhadap rencana kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Capaian ini mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Tabel 2.8
Realisasi Keuangan Perangkat Daerah

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Pagu		Realisasi sampai TW I 2025	Persentase Capaian
			RKPD 2025	APBD 2025		
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	11.961.736.457	12.736.423.070	2.457.963.310	19,30
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	160.315.000	109.550.000	692.500	0,63
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	117.440.000	68.640.000	0	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.675.000	5.010.000	692.500	13,82
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.200.000	35.900.000	0	0,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	8.287.833.504	10.267.760.770	1.942.262.534	18,92
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8.235.833.504	10.215.760.770	1.941.512.534	19,01



	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	52.000.000	52.000.000	750.000	1,44
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	177.500.000	125.000.000	0	0,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	52.500.000	0	0	0,00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	125.000.000	125.000.000	0	0,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.439.173.153	878.183.000	373.940.610	42,58
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25.003.000	12.344.000	0	0,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	500.000.000	401.407.500	309.732.000	77,16
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	55.005.000	16.352.500	1.985.000	12,14
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6.000.000	2.000.000	200.000	10,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	743.165.153	406.079.000	51.503.610	12,68
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	110.000.000	40.000.000	10.520.000	26,30
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	470.396.000	243.896.000	0	0,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	470.396.000	243.896.000	0	0,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	920.298.800	684.180.800	139.777.666	20,43



	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	2.250.000	1.000.000	44,44
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	381.000.000	334.750.000	68.647.766	20,51
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	277.448.000	211.128.000	27.050.000	12,81
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	257.850.800	136.052.800	43.079.900	31,66
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	506.220.000	427.852.500	1.290.000	0,30
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100.000.000	51.652.500	0	0,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70.220.000	25.200.000	1.290.000	5,12
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	336.000.000	351.000.000	0	0,00
2.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (%), Persentase kepemilikan KK (%), Persentase kepemilikan KTP elektronik (%)	398.540.000	302.250.000	21.440.000	7,09
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Ketercapaian Pelayanan Pendaftaran Penduduk	218.540.000	175.250.000	21.440.000	12,23
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	75.000.000	100.000.000	0	0,00
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	120.000.000	66.070.000	21.040.000	31,85



	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	23.540.000	9.180.000	400.000	4,36
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	180.000.000	127.000.000	0	0,00
	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	30.000.000	2.000.000	0	0,00
	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	150.000.000	125.000.000	0	0,00
3	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Kepemilikan dokumen Perkawinan, Prosentase Kepemilikan akta kelahiran anak (usia 0 - 18 tahun), Prosentase Penerbitan akta kematian	150.666.000	152.843.800	16.680.000	10,91
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Ketercapaian Pelayanan Pencatatan Sipil	88.870.800	49.420.800	15.780.000	31,93
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	88.870.800	49.420.800	15.780.000	31,93
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	61.795.200	103.423.000	900.000	0,87
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	10.565.200	3.423.000	900.000	26,29
	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil Jumlah	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	51.230.000	100.000.000	0	0,00
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah lembaga pemerintah yang memanfaatkan data base Kependudukan, Sistem Informasi Kependudukan yang diperbarui.	559.063.000	1.074.299.600	350.000	0,03



	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Ketercapaian Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	32.463.000	10.350.000	350.000	3,38
	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	32.463.000	10.350.000	350.000	3,38
	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Ketercapaian Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	293.000.000	143.040.000	0	0,00
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	293.000.000	143.040.000	0	0,00
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	233.600.000	920.909.600	0	0,00
	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	60.000.000	134.039.600	0	0,00
	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	173.600.000	786.870.000	0	0,00
5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase tersusunnya Profil Kependudukan Kabupaten	13.500.000	7.175.000	0	0,00
	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	13.500.000	7.175.000	0	0,00
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	13.500.000	7.175.000	0	0,00



2.2 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat diakomodir melalui proses Musrenbang kabupaten. Musrenbang kabupaten adalah musyawarah para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten untuk mematangkan rancangan RKPD kabupaten berdasarkan Renja SKPD hasil forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD. Prinsip-prinsip penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten adalah memperhatikan hasil pembahasan forum SKPD atau forum gabungan SKPD, hasil musrenbang kecamatan, RPJMD atau Renstra Daerah (bagi daerah yang belum melakukan Pilkada), hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun berjalan dan masukan dari para peserta.

Keluaran dari pelaksanaan musrenbang kabupaten adalah kesepakatan tentang rumusan yang menjadi masukan utama untuk memutakhirkan rancangan RKPD dan rancangan Renja SKPD, yang meliputi penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan pagu indikatif menurut fungsi/SKPD.

Untuk Adapun hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui kegiatan Musrenbang tingkat Kabupaten disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.9
Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 Kabupaten Kendal

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	<u>NIHIL</u>				



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 sampai dengan Triwulan I dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output sub kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Secara keseluruhan pagu indikatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal yang semula sebesar Rp.14.272.991.470,- pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Tahun 2025 sesuai dengan Pagu RKPD Perubahan Renja menjadi Rp.13.052.768.085,-, ada penurunan Rp. 1.220.223.385 Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran sesuai Surat Edaran yang berlaku.

Untuk prioritas di perubahan adalah di sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor untuk pembelian Ribbon dan Film Printer Cetak EKTP guna persiapan cetak KTP Elektronik.

Adapun rincian perubahan program kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Yang dijabarkan dalam subkegiatan:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 68.640.000,- berkurang Rp. 15.640.000,- menjadi Rp. 53.000.000,- dikarenakan efisiensi anggaran sesuai Surat Edaran yang berlaku.
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 5.010.000,- tidak mengalami penambahan maupun pengurangan.
- c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 35.900.000,- tidak mengalami penambahan maupun pengurangan.
- d. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, sebesar Rp. 10.215.760.770,- berkurang Rp. 892.095.385,- menjadi Rp. 9.323.665.385,-; dilakukan Desk perhitungan ulang Kebutuhan Gaji PNS dan PPPK sesuai jumlah pegawai yang ada masih ada potensi silpa pada anggaran Gaji dan Tunjangan ASN



- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 52.000.000,- berkurang Rp. 2.000.000,- menjadi Rp. 50.000.000,- dikarenakan efisiensi anggaran sesuai Surat Edaran yang berlaku
- f. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 125.000.000,- berkurang Rp. 125.000.000,- menjadi Rp. 0,- dikarenakan efisiensi anggaran sesuai Surat Edaran yang berlaku.
- g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 12.344.000,- tidak mengalami penambahan maupun pengurangan.
- h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 401.407.500,- bertambah Rp. 624.120.000,- menjadi Rp. 1.025.527.500,- untuk pembelian Ribbon dan Film Printer Cetak EKTP guna persiapan cetak KTP Elektronik
- i. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 16.352.500,- bertambah Rp. 900.000,- menjadi Rp. 17.252.500,- untuk koordinasi dengan UPTD.
- j. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 2.000.000,- bertambah Rp. 2.000.000,- menjadi Rp. 4.000.000,- untuk pembelian MMT dan foto copy.
- k. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 406.079.000,- berkurang Rp. 103.510.000,- menjadi Rp. 302.569.000,- dikarenakan efisiensi anggaran sesuai Surat Edaran yang berlaku.
- l. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 40.000.000,- bertambah Rp. 45.400.000,- menjadi Rp. 85.400.000,- untuk pembelian rak arsip.
- m. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 243.896.000,- berkurang Rp. 82.500.000,- menjadi Rp. 161.396.000,- dikarenakan efisiensi anggaran sesuai Surat Edaran yang berlaku.
- n. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 2.250.000,- bertambah Rp. 1.750.000,- menjadi Rp. 4.000.000,- untuk pembelian Materai
- o. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 334.750.000,- bertambah Rp. 40.000.000,- menjadi Rp. 374.750.000,- untuk Pembayaran internet, PAM dan listrik.



- p. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 211.128.000,- bertambah Rp. 15.400.000,- menjadi Rp. 226.528.000,- untuk menambahi BPJS Ketenagakerjaan
- q. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 136.052.800,- bertambah Rp. 2.400.000,- menjadi Rp. 138.452.800,- untuk pembayaran retribusi sampah.
- r. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 51.652.500,- tidak mengalami penambahan maupun pengurangan.
- s. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 25.200.000,- bertambah Rp. 16.290.000,- menjadi Rp. 41.490.000,- untuk perawatan/pemeliharaan mobil
- t. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 351.000.000,- berkurang Rp. 86.000.000,- menjadi Rp. 265.000.000,- dikarenakan efisiensi anggaran sesuai Surat Edaran yang berlaku.

2. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

Yang dijabarkan dalam subkegiatan:

- a. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 100.000.000,- berkurang Rp. 20.600.000,- menjadi Rp. 79.400.000,- dikarenakan efisiensi anggaran sesuai Surat Edaran yang berlaku.
- b. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 66.070.000,- tidak mengalami penambahan maupun pengurangan.
- c. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 9.180.000,- tidak mengalami penambahan maupun pengurangan.
- d. Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 2.000.000,- tidak mengalami penambahan maupun pengurangan.
- e. Sosialisasi Pendaftaran Penduduk, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 125.000.000,- berkurang Rp. 49.850.000,- menjadi Rp. 75.150.000,- dikarenakan efisiensi anggaran sesuai Surat Edaran yang berlaku.



3. PROGRAM PENCATATAN SIPIL

Yang dijabarkan dalam subkegiatan:

- a. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 49.420.800,- tidak mengalami penambahan maupun pengurangan.
- b. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 3.423.000,- berkurang Rp. 3.000.000,- menjadi Rp. 3.420.000,- dikarenakan efisiensi anggaran sesuai Surat Edaran yang berlaku.
- c. Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 100.000.000,- berkurang Rp. 20.600.000,- menjadi Rp. 79.400.000,- dikarenakan efisiensi anggaran sesuai Surat Edaran yang berlaku.

4. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

- a. Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 10.350.000,- berkurang Rp. 4.355.000,- menjadi Rp. 5.995.000,- dikarenakan efisiensi anggaran sesuai Surat Edaran yang berlaku.
- b. Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 143.040.000,- tidak mengalami penambahan maupun pengurangan.
- c. Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 143.039.600,- berkurang Rp. 36.750.000,- menjadi Rp. 97.289.600,- dikarenakan efisiensi anggaran sesuai Surat Edaran yang berlaku.
- d. Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 786.870.000,- berkurang Rp. 481.580.000,- menjadi Rp. 305.290.000,- dikarenakan efisiensi anggaran sesuai Surat Edaran yang berlaku.

V. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

- a. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain, dengan anggaran penetapan sebesar Rp. 7.175.000,- tidak mengalami penambahan maupun pengurangan.

Adapun uraian program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami penurunan ataupun kenaikan pagu indikatif adalah sebagai berikut :



Tabel 3.1

Uraian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Yang Mengalami Penurunan Atau pun Kenaikan Pagu Indikatif

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Taget 2025		Pagu Indikatif (Rp.)		Bertambah/ Berkurang
			Sebelum	Sesudah	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				14.272.991.470	13.052.768.085	1.220.223.385
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				14.272.991.470	13.052.768.085	1.220.223.385
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				14.272.991.470	13.052.768.085	1.220.223.385
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.736.423.070	12.129.937.685	606.485.385
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				109.550.000	93.910.000	15.640.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	68.640.000	53.000.000	15.640.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1 laporan	5.010.000	5.010.000	-



Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 laporan	2 laporan	35.900.000	35.900.000	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.267.760.770	9.325.665.385	942.095.385
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 orang/bulan	94 orang/bulan	10.215.760.770	9.323.665.385	892.095.385
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	52.000.000	2.000.000	50.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				125.000.000	0	125.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	94 Paket	94 Paket	0	0	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	100 Orang	0	0	-
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang	125.000.000	0	125.000.000



	Administrasi Umum Perangkat Daerah				878.183.000	1.447.093.000	568.910.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	12.344.000	12.344.000	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	401.407.500	1.025.527.500	624.120.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	16.352.500	17.252.500	900.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	2.000.000	4.000.000	2.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	406.079.000	302.569.000	103.510.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000	85.400.000	45.400.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				243.896.000	161.396.000	82.500.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	12 Unit	243.896.000	161.396.000	82.500.000



	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				684.180.800	743.730.800	59.550.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	2.250.000	4.000.000	1.750.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	334.750.000	374.750.000	40.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	211.128.000	226.528.000	15.400.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	136.052.800	138.452.800	2.400.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				427.852.500	358.142.500	69.710.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	54 Unit	54 Unit	51.652.500	51.652.500	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	25.200.000	41.490.000	16.290.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	7 Unit	351.000.000	265.000.000	86.000.000



	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				302.250.000	231.800.000	70.450.000
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk				175.250.000	154.650.000	20.600.000
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan						
		Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1500 Dokumen	1500 Dokumen	100.000.000	79.400.000	20.600.000
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk						
		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	1000 Dokumen	1000 Dokumen	66.070.000	66.070.000	-
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk						
		Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	12 Laporan	9.180.000	9.180.000	-
	Penataan Pendaftaran Penduduk		-	-	0	0	-
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk						
		Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	12 Dokumen	12 Dokumen	0	0	-



	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				127.000.000	77.150.000	49.850.000
	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk						
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	30 Laporan	30 Laporan	2.000.000	2.000.000	-
	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk						
		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	12 Laporan	125.000.000	75.150.000	49.850.000
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				152.843.800	132.240.800	20.603.000
	Pelayanan Pencatatan Sipil				49.420.800	49.420.800	-
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil						
		Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	3 Layanan	3 Layanan	49.420.800	49.420.800	-
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				103.423.000	82.820.000	20.60.000
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil						
		Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12 Laporan	12 Laporan	3.423.000	3.420.000	3.000.000
	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil						
		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000	79.400.000	20.600.000



	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				1.074.299.600	551.614.600	522.685.000
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				10.350.000	5.995.000	4.355.000
	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan						
		Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	24 Dokumen	24 Dokumen	10.350.000	5.995.000	4.355.000
	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				143.040.000	143.040.000	-
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						
		Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	143.040.000	143.040.000	-
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				920.909.600	402.579.600	518.330.000
	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	12 Laporan	134.039.600	97.289.600	36.750.000



	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						
		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	12 Laporan	786.870.000	305.290.000	481.580.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				7.175.000	7.175.000	-
	Penyusunan Profil Kependudukan				7.175.000	7.175.000	-
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain						
		Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	7.175.000	7.175.000	-



BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen penting yang harus dilaksanakan oleh OPD guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian.

1. Dokumen ini bersifat dinamis sehingga harus dijalankan dengan tetap memperhatikan kondisi faktual serta kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu.
2. Ketersediaan anggaran sering kali tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan, sehingga diperlukan strategi penyesuaian melalui penetapan skala prioritas, efisiensi, dan optimalisasi sumber daya yang ada.

Selain itu, dalam implementasi kegiatan harus dijaga konsistensi dengan kaidah peraturan perundang-undangan, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta komitmen dalam memberikan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berkualitas. Dengan memperhatikan catatan penting ini, diharapkan pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan dapat berjalan secara efektif, terukur, dan memberikan hasil yang nyata bagi peningkatan pelayanan administrasi kependudukan.

Mengingat hal tersebut, maka perlu ditetapkan kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Perubahan Rencana Kerja ini memuat rencana program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang Administrasi Kependudukan, yang pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten;
2. Organisasi Perangkat Daerah dan stakeholders berkewajiban melaksanakan program- program dalam Perubahan Rencana Kerja dengan sebaik-baiknya;
3. Perubahan Rencana Kerja ini disusun dengan mengacu pada pendekatan baru dalam sistem penganggaran, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.



Sebagai tindak lanjut dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini, seluruh program dan kegiatan yang telah ditetapkan akan dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana pelaksanaan anggaran, pengendalian, serta evaluasi kinerja perangkat daerah. Setiap bidang di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban melaksanakan program sesuai tugas dan fungsinya dengan tetap memperhatikan skala prioritas dan keterbatasan sumber daya yang tersedia.

Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi dan komunikasi antarbidang serta dengan pemangku kepentingan terkait agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan selaras dengan target pembangunan daerah. Pemantauan dan evaluasi secara berkala akan dilakukan untuk mengukur capaian, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan langkah korektif yang diperlukan. Dengan demikian, dokumen Rencana Kerja Perubahan ini tidak hanya menjadi instrumen perencanaan, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan strategis dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan secara berkesinambungan.

Demikian penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 ini disusun untuk dapat dijadikan acuan bagi segenap aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan untuk diketahui oleh para stakeholder yang berkepentingan.

Kendal, Juli 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL



RATNA MUSTIKANINGSIH, S.E, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19740404 199803 2 007